

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Indonesia's Presidency On G20 2022: Unpacking Its Digital Economic Diplomacy In Advancing Indonesian MSMEs Digital Economic Transformation	Abdul Razaq Cangara Bama Andika Putra Patrice Lumumba Chantika Salsabila Alarsah Andi Faradilla Ayu Lestari	Kedua artikel tersebut berpusat pada dampak kepresidenan Indonesia di G20 dalam mengatasi tantangan pasca-COVID-19. Keduanya menekankan pentingnya upaya diplomasi dalam membentuk kepentingan nasional dan pemulihan pascapandemi, dengan yang pertama secara khusus menyoroti peran transformasi ekonomi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).	Yang pertama berfokus pada diplomasi ekonomi digital dan transformasi UMKM Indonesia, sedangkan yang kedua menggali pengaruh kepresidenan G20 dalam meningkatkan ketahanan pariwisata Indonesia pascapandemi.

2	G20 FORUM, INDONESIA PRESIDENCY; AN IMPACT FOR GLOBAL DEVELOPMENT	Markwin Hasahatan	Penulis menggarisbawahi pentingnya peran forum G20 dalam kerangka pembangunan global.	Jurnal kedua membahas dampak global dari kepresidenan Indonesia di G20, dengan fokus pada tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Laporan ini menyoroti dampak negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, rantai pasokan global, dan stabilitas ekonomi.
3	Presidensi G20 sebagai Sarana Marketing dan Branding Pariwisata Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Hotel Melia Bali)	Putu Nia Purnama Santi ayan Ardani Ida Ayu Sasmitha Putri	Sama sama mengeksplorasi peran kepresidenan Indonesia di G20 sebagai alat pemasaran dan branding pariwisata Indonesia, khususnya dampaknya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan di masa pandemi Covid-19.	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penyebaran kuesioner, dan analisis menggunakan PLS (Partial Least Square). Dan hanya spesifik di Bali.
4.	Rehabilitating the tourism sector post Covid-19 pandemic: lesson learnt from Indonesia	Carunia Mulya Firdausy	Jurnal ini sama sama mendalami rehabilitasi sektor pariwisata di Indonesia pasca-COVID-19.	Perbedaannya menyoroti pentingnya penelitian kebijakan komparatif internasional dalam lanskap pariwisata pascapandemi, sebuah bidang yang masih terbatas hingga saat ini.
5.	Indonesia's Contributive Role in the G20 to	Ayu Heryati Naqsabandiyah,	Penelitian ini sama sama melihat bagaimana Presidensi G20	Perbedaannya penelitian ini tidak hanya berfokus di satu

	Mitigate the COVID-19 Pandemic	Muhammad Ibrahim Arfah, M. Solahudin Al Ayubi	Indonesia memitigasi perekonomian pasca Pandemi COVID-19	sektor saja. Namun aecara nasional dibeberapa sektor.
6.	Indonesia's Economic Diplomacy at the G20 Summit	Henike Primawanti, Yasmin Khairunisa, Nur Khalida, Ismail Daffa	Kesamaan dengan jurnal ini adalah sama sama mendalami diplomasi ekonomi Indonesia pada KTT G20 tahun 2022, khususnya dengan fokus pada upaya pemulihan sektor ekonomi pasca-COVID-19	Perbedaannya adalah menyoroti diplomasi ekonomi Indonesia, menekankan upaya transformasi ekonomi digital dengan fokus khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7.	Indonesia in the G20: Benefits And Challenges Amidst National Interests and Priorities	Zamroni Salim	Kesamaannya adalah mengeksplorasi posisi Indonesia di G20 dengan fokus pada manfaat dan tantangan di tengah kepentingan dan prioritas nasional.	Perbedaannya tidak berfokus di pariwisata namun menganalisis kedudukan ekonomi dan politik Indonesia di G20
8.	Building back better tourism sector post-COVID-19 pandemic in Indonesia: input-output and simulation analysis	Carunia Mulya Firdausy & Pihri Buhaerah	Persamaan mengeksplorasi kebijakan pembangunan kembali sektor pariwisata di Indonesia pasca-COVID-19	Namun penelitian ini menekankan pentingnya menjaga pasokan input dalam negeri, yang berfungsi sebagai sumber utama input perantara di sektor pariwisata dan industri terkait.

Dalam Literatur pertama berjudul “Jurnal Indonesia’s Presidency On G20 2022: Unpacking Its Digital Economic Diplomacy In Advancing Indonesia UMKMs Digital Economic Transformation” artikel tersebut berpusat pada dampak

kepresidenan Indonesia di G20 dalam mengatasi tantangan pasca-COVID-19. Yang pertama berfokus pada diplomasi ekonomi digital dan transformasi UMKM Indonesia, sedangkan yang kedua menggali pengaruh kepresidenan G20 dalam meningkatkan ketahanan pariwisata Indonesia pascapandemi. Keduanya menekankan pentingnya upaya diplomasi dalam membentuk kepentingan nasional dan pemulihan pascapandemi, dengan yang pertama secara khusus menyoroti peran transformasi ekonomi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jurnal ini memberikan wawasan berharga mengenai aspek ekonomi dari kepresidenan Indonesia di G20, dengan menekankan potensi dampak terhadap ketahanan UMKM pasca-COVID-19. Regional masalah yang diangkat adalah peran ekonomi digital dalam memajukan UMKM di Indonesia. Teori yang mungkin digunakan melibatkan konsep transformasi digital dan dampaknya pada sektor ekonomi, terutama UMKM. Kesamaannya dengan literatur lainnya adalah penekanan pada dampak kepresidenan G20 terhadap ketahanan pasca-pandemi (Razaq Cangara, Andika Putra, Lumumba, Salsabila Alarsah, & Faradilla Ayu Lestari, 2022).

Kemudian, Jurnal kedua bertajuk “G20 Forum, Indonesia Presidency; An Impact For Global Development” Jurnal kedua membahas dampak global dari kepresidenan Indonesia di G20, dengan fokus pada tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Laporan ini menyoroti dampak negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, rantai pasokan global, dan stabilitas ekonomi. Tema Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger,” ditekankan sebagai seruan untuk berkolaborasi di seluruh dunia, yang bertujuan untuk pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penulis menggarisbawahi pentingnya peran forum G20 dalam kerangka pembangunan global, dan mengakui perlunya komunikasi yang lebih jelas untuk menyampaikan apakah forum tersebut dianggap sebagai beban atau manfaat bagi masyarakat.. Literatur ini melengkapi jurnal pertama dengan menawarkan pandangan yang lebih global dan memberikan landasan untuk memahami peran Indonesia dalam kerja sama internasional. Regional masalahnya mencakup dampak pandemi secara global dan bagaimana Indonesia dapat berkontribusi. Teori yang mungkin muncul dapat melibatkan konsep kerja sama internasional dan

pembangunan global. Kesamaannya adalah fokus pada dampak kepemimpinan G20 di tingkat global (Hasahatan, 2020).

Selanjutnya Jurnal ketiga, “Presidensi G20 sebagai Sarana Marketing dan Branding Pariwisata Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan pada Era Pandemi Covid-19,” Jurnal ketiga mengeksplorasi peran kepemimpinan Indonesia di G20 sebagai alat pemasaran dan branding pariwisata Indonesia, khususnya dampaknya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan di masa pandemi Covid-19. Studi yang dilakukan di Hotel Melia Bali ini bertujuan untuk memahami bagaimana kepemimpinan G20 mempengaruhi pemasaran dan branding pariwisata Indonesia dan korelasinya dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yakni mensurvei wisatawan yang pernah menginap di Hotel Melia Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penyebaran kuesioner, dan analisis menggunakan PLS (Partial Least Square). Temuan penelitian menunjukkan adanya dampak positif dan signifikan dari kepemimpinan G20 terhadap pemasaran dan branding pariwisata Indonesia yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan di Hotel Melia Bali. Studi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan G20 berfungsi sebagai peluang untuk mempromosikan dan meningkatkan citra pariwisata, memberikan manfaat bagi hunian dan kunjungan hotel. Manajemen hotel dapat memanfaatkan pertemuan G20 untuk promosi yang efektif guna meningkatkan okupansi dan kunjungan ke Hotel Melia Bali. Penelitian ini memperkenalkan gagasan untuk memanfaatkan upaya diplomatik untuk promosi pariwisata, yang selaras dengan tema peningkatan ketahanan pariwisata pasca-COVID-19 dalam penelitian yang diusulkan. regional masalahnya adalah pemasaran dan branding pariwisata Indonesia melalui kepemimpinan G20. Teori yang mungkin digunakan melibatkan konsep diplomasi pariwisata dan dampaknya terhadap ketahanan pariwisata. Kesamaannya adalah pemahaman tentang dampak kepemimpinan G20 pada sektor pariwisata pasca-COVID-19 (Santi, Ardani, & Putri, 2022).

Kemudian artikel jurnal selanjutnya adalah “Rehabilitating the tourism sector post Covid-19 pandemic: lesson learnt from Indonesia”, Jurnal 4 mendalami rehabilitasi sektor pariwisata di Indonesia pasca-COVID-19 yang ditulis oleh Carunia Mulya Firdausy. Makalah yang berafiliasi dengan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Tarumanagara dan Pusat Penelitian Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini membahas inisiatif pemerintah dalam hal ini. Dengan menggunakan sumber sekunder, penulis meninjau dan menganalisis data secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan atau strategi pariwisata yang bersifat universal tidak cocok untuk semua negara. Pendekatan Indonesia, yang berfokus pada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, memerlukan rencana aksi terperinci dan target kuantitatif, yang melibatkan kolaborasi erat dengan sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata. Selain itu, penelitian kebijakan berbasis bukti ditekankan sebagai hal yang penting dalam mendukung keputusan rehabilitasi sektor pariwisata pasca-COVID-19. Studi ini berkontribusi pada bidang ini dengan menyoroti pentingnya penelitian kebijakan komparatif internasional dalam lanskap pariwisata pascapandemi, sebuah bidang yang masih terbatas hingga saat ini. Kata kuncinya meliputi kebijakan pariwisata, inovasi, adaptasi, kolaborasi, pascapandemi COVID-19, dan Indonesia. Regional masalahnya melibatkan strategi dan kebijakan praktis yang diterapkan di Indonesia. Teori yang mungkin muncul adalah konsep rehabilitasi sektor pariwisata dan pembelajaran dari pengalaman. Kesamaannya adalah pemahaman tentang tantangan dan strategi rehabilitasi sektor pariwisata pasca-COVID-19 (Firdausy, 2023).

Kemudian, Jurnal yang kelima berjudul “Indonesia’s Contributive Role in the G20 to Mitigate the COVID-19 Pandemic”. Jurnal ini mengeksplorasi peran kontributif Indonesia di G20 dalam mengatasi tantangan pandemi COVID-19 dimana penulisnya menyarankan agar Indonesia dapat mendorong G20 untuk membuat program khusus untuk mendapatkan donasi dan pendanaan dari negara-negara anggota, sehingga meningkatkan peran lembaga tersebut dalam tata kelola kesehatan global. Selain itu, penulis mengusulkan agar Indonesia dapat mengadvokasi peningkatan bantuan dalam bentuk alat-alat COVID-19, seperti terapi, diagnostik, dan sistem kesehatan, terutama untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menghadapi kesenjangan vaksinasi. Penelitian ini menunjukkan potensi peran Indonesia dalam mendesak G20 untuk mengadopsi mekanisme Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional, serupa dengan yang digunakan oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan

Iklim. Mekanisme ini mengharuskan setiap negara anggota G20 berkontribusi dalam mitigasi COVID-19 dan meningkatkan sistem kesehatan global berdasarkan keputusan dan kapasitas masing-masing negara. Para penulis menekankan bahwa Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam program kesehatan G20 di luar masa kepresidenannya, dengan bertindak sebagai perwakilan untuk menyuarakan keprihatinan kesehatan di negara-negara berkembang dan terbelakang yang memerlukan perhatian dari para pemimpin global. Regional masalahnya adalah peran diplomasi Indonesia dalam mitigasi pandemi. Teori yang mungkin terlibat melibatkan konsep kerja sama global dan upaya kolaboratif. Kesamaannya adalah penekanan pada diplomasi G20 untuk mengatasi tantangan global, termasuk ketahanan pariwisata pasca-COVID-19 (Ayu Heryati Naqsbandiyah, Muhammad Ibrahim Arfah, & Muhammad Solahudin Al-Ayubi, 2022).

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Indonesia’s Economic Diplomacy at the G20 Summit” Jurnal 6 mendalami diplomasi ekonomi Indonesia pada KTT G20 tahun 2022, khususnya dengan fokus pada upaya pemulihan sektor ekonomi pasca-COVID-19. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia memanfaatkan kepresidenan G20 untuk secara kolaboratif mengatasi tantangan ekonomi global yang disebabkan oleh gejolak politik dan pandemi COVID-19. Makalah ini menyoroti diplomasi ekonomi Indonesia, menekankan upaya transformasi ekonomi digital dengan fokus khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya untuk memberikan referensi bagi akademisi yang peduli terhadap permasalahan perekonomian dan membantu pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Laporan ini mengkaji posisi perekonomian Indonesia, baik secara regional maupun global, sehingga memberikan informasi penting untuk memahami faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ketahanan pariwisata pasca-COVID-19. Regional masalahnya melibatkan posisi perekonomian Indonesia secara regional dan global. Teori yang mungkin digunakan melibatkan konsep diplomasi ekonomi dan dampaknya pada ketahanan pariwisata. Kesamaannya adalah pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ketahanan pariwisata pasca-COVID-19 (Primawanti, Khairunisa, Khalida, & Daffa, 2023).

Kemudian, Artikel Jurnal selanjutnya, *Indonesia in the G20: Benefits And Challenges Amidst National Interests and Priorities*. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Zamroni Salim mengeksplorasi posisi Indonesia di G20 dengan fokus pada manfaat dan tantangan di tengah kepentingan dan prioritas nasional. G20, yang dibentuk untuk mengatasi krisis keuangan global dan membahas peraturan untuk stabilitas masa depan, memberikan harapan akan kolaborasi di antara beragam negara anggotanya. Indonesia, sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara di G20, dibahas dalam konteks jumlah penduduk dan ukuran perekonomiannya. Penelitian ini menggali keterlibatan Indonesia dalam perekonomian terintegrasi, baik secara regional (misalnya, Komunitas Ekonomi ASEAN) dan internasional (misalnya, Organisasi Perdagangan Dunia). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ekonomi dan politik Indonesia di G20, mengingat besarnya perekonomian negara tersebut. Regional masalahnya adalah peran Indonesia dalam G20 dan bagaimana hal tersebut memengaruhi ketahanan pariwisata. Teori yang mungkin digunakan melibatkan konsep kepentingan nasional dan diplomasi ekonomi. Kesamaannya adalah pemahaman tentang posisi Indonesia dalam G20 dan dampaknya pada ketahanan pariwisata pasca-COVID-19. Literatur ini membantu mengkontekstualisasikan posisi Indonesia dalam G20, memberikan kontribusi informasi penting untuk memahami lanskap diplomatik yang lebih luas yang dapat mempengaruhi ketahanan pariwisata pasca-COVID-19 (Salim, 2010).

Terakhir, jurnal delapan, “Building back better tourism sector post-COVID-19 pandemic in Indonesia: input-output and simulation analysis” menggunakan analisis input-output dan simulasi untuk mengeksplorasi kebijakan pembangunan kembali sektor pariwisata pasca-COVID-19 di Indonesia. Jurnal yang ditulis oleh Carunia Mulya Firdausy dan Pihri Buhaerahba melakukan analisis input-output dan simulasi untuk mengeksplorasi kebijakan pembangunan kembali sektor pariwisata di Indonesia pasca-COVID-19. Studi ini menekankan pentingnya menjaga pasokan input dalam negeri, yang berfungsi sebagai sumber utama input perantara di sektor pariwisata dan industri terkait. Dimana temuan menunjukkan bahwa untuk membangun kembali sektor pariwisata yang lebih baik setelah pandemi, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata sangatlah penting. Analisis simulasi menyoroiti dampak parah pandemi COVID-19

terhadap industri pariwisata, khususnya penurunan output dibandingkan dengan hilangnya nilai tambah dan hilangnya pendapatan tenaga kerja. Studi ini menggarisbawahi perlunya penelitian kebijakan berbasis bukti dan upaya kolaboratif untuk merumuskan kebijakan pariwisata yang efektif.

Regional masalahnya adalah kebijakan pembangunan kembali sektor pariwisata pasca-COVID-19. Teori yang mungkin terlibat melibatkan konsep input-output analysis dan simulasi kebijakan. Kesamaannya adalah pemahaman metodologis dan rekomendasi kebijakan untuk membangun kembali ketahanan sektor pariwisata. Literatur ini menawarkan wawasan metodologis dan rekomendasi kebijakan, memberikan perspektif praktis dalam membangun kembali ketahanan sektor pariwisata (Firdausy & Buhaerah, 2022).

Jurnal-jurnal ini secara kolektif memberikan pemahaman komprehensif tentang kepresidenan Indonesia di G20, upaya ekonomi dan diplomatiknya, peran strategi digital, serta tantangan dan pembelajaran dari rehabilitasi sektor pariwisata pasca-COVID-19. Setiap literatur memberikan kontribusi aspek unik untuk menginformasikan usulan penelitian mengenai pengaruh kepresidenan G20 terhadap peningkatan ketahanan pariwisata Indonesia pasca-COVID-19.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Diplomasi Pariwisata

Dalam pengertian paling luas, diplomasi mengacu pada pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dengan cara yang damai, menggunakan Teknik persuasi dan negosiasi (Lee & Hocking, 2011). Dalam pengertian pada bidang politik internasional yang lebih spesifik, diplomasi dianggap sebagai salah satu proses utama yang mencirikan sistem internasional dan sebuah institusi yang mendefinisikan sistem negara-negara berdaulat, atau yang biasa disebut sebagai sistem “*Westphalian*” setelah Perdamaian Westphalia pada tahun 1684 (Lee & Hocking, 2011).

Dapat didefinisikan bahwa diplomasi merupakan implementasi strategi untuk menjalin hubungan secara resmi antar pemerintah negara atau hubungan antar negara melalui cara-cara yang damai. Diplomasi juga turut dilakukan berdasarkan kepentingan nasional yang dimiliki oleh tiap negara. Dalam praktiknya, banyak

teori serta konsep-konsep turunan dari diplomasi, yang digunakan oleh berbagai negara untuk mencapai berbagai tujuan yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Pada konteks penelitian ini, salah satu konsep dari diplomasi yang akan digunakan penulis adalah diplomasi pariwisata.

Diplomasi pariwisata merupakan salah satu bentuk dari *soft diplomacy*. Sebagai salah satu sektor yang banyak mendukung perekonomian negara, pariwisata dapat dimanfaatkan menjadi bagian diplomasi Indonesia. Pariwisata bukan hanya sebatas sektor ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian dan peternakan hingga industri, konstruksi, dan infrastruktur. Meskipun pariwisata memiliki kontribusi ekonomi yang besar, penting untuk tidak hanya memandangnya sebagai sektor ekonomi semata. Pariwisata juga memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan terhadap kesatuan domestik dan kehidupan budaya suatu negara. Hal ini juga memengaruhi reputasi dan prestise internasional suatu negara serta berperan dalam fungsi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi pariwisata menjadi salah satu subyek penting dalam diplomasi publik.

Pariwisata menghubungkan masyarakat dan negara melalui peran penting yang membantu membangun identitas nasional (L'etang & Pieczka, 2006). Diplomasi Pariwisata adalah proses promosi sumber daya pariwisata dan penyelesaian krisis atau masalah di suatu tujuan tertentu melalui negosiasi damai antara dua atau lebih negara atau di antara negara-negara melalui kekuatan damai pariwisata (Baranowski et al., 2019). Seluruh dunia saat ini menderita dari berbagai kategori krisis seperti perang, konflik agama, penyakit, dan migrasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk membentuk pola negosiasi internasional baru untuk menghancurkan atau meredakan ketidakstabilan politik atau konflik antar negara atau masyarakat.

Tujuan dari diplomasi pariwisata adalah untuk mempromosikan dan berinvestasi dalam industri pariwisata, meminimalkan krisis dan konflik saat ini antara negara-negara, menghasilkan wisatawan, meningkatkan tingkat hidup komunitas tuan rumah, melestarikan sumber daya alam, menjalankan politik hijau, dan membawa perdamaian di antara negara-negara (Bunakov, 2018). Diplomasi pariwisata sebenarnya merupakan "*match-brand*" dari diplomasi budaya. Hal ini

disebabkan oleh peran pariwisata dalam meningkatkan interaksi budaya dan mendekatkan masyarakat satu sama lain. Dengan mendorong interaksi budaya, pariwisata dapat menjadi alat efektif dalam diplomasi untuk membangun hubungan yang positif antara negara-negara dan masyarakat Indonesia.

Pada konteks Indonesia sebagai Negara Presidensi G20, Diplomasi Pariwisata dilakukan pada sebelum, saat, dan pasca forum G20 sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan industri pariwisata di Indonesia. Momentum perkumpulan negara-negara anggota G20 di Indonesia, seharusnya menjadi momentum yang sangat penting bagi Indonesia untuk bangkit dan memulihkan ekonominya, khususnya di industri pariwisata pasca pandemi Covid-19. Maka dari itu, penulis menggunakan konsep diplomasi pariwisata untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam mengoptimalkan momentumnya sebagai Presidensi forum G20.

2.2.2 Pariwisata Internasional

Pariwisata Internasional sebagaimana yang didefinisikan United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), mencakup aktivitas individu yang berpergian dan tinggal di luar negaranya untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan untuk keperluan rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya, Berdasarkan definisi ini, industri pariwisata mencakup semua kegiatan sosio-ekonomi yang secara langsung dan/atau tidak langsung terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada wisatawan. UNWTO mengidentifikasi 185 aktivitas sisi penawaran yang memiliki hubungan signifikan dengan sektor pariwisata (UNWTO, 2008). Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup layanan dari berbagai sektor, seperti transportasi dan komunikasi, hotel dan penginapan, makanan dan minuman, layanan budaya dan hiburan, perbankan dan keuangan, serta layanan promosi dan publikasi, Didefinisikan oleh jaringan aktivitas sosio-ekonomi yang mengesankan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya, pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia serta kategori penting dalam perdagangan internasional (UNWTO, 2008).

Aktivitas pariwisata internasional telah menunjukkan pertumbuhan yang substansial dan berkembang baik dari segi pendapatan pariwisata maupun jumlah

wisatawan, dan telah meninggalkan jejak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang luas yang mencapai hampir setiap bagian dunia. Aktivitas pariwisata internasional memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara tuan rumah dan negara asal wisatawan (SESRIC, 2018). Menurut UNWTO, jumlah kedatangan wisatawan internasional meningkat dari 998 juta pada tahun 2011 menjadi 1.235 juta pada tahun 2016, yang berarti tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,4 persen. Pendapatan yang dihasilkan oleh wisatawan tersebut, yaitu penerimaan pariwisata internasional, dalam harga dolar AS saat ini, meningkat dari \$1.073 miliar menjadi \$1.220 miliar pada periode yang sama, yang berarti tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 2,6 persen. Pada tahun 2016, pendapatan pariwisata dunia mencapai \$3,34 miliar per hari atau \$988 per kedatangan wisatawan.

Aktivitas pariwisata internasional juga ditandai dengan peningkatan terus-menerus dalam penyebaran geografis dan diversifikasi destinasi dan produk wisata. Meskipun sebagian besar aktivitas pariwisata internasional masih terkonsentrasi di wilayah maju seperti Eropa dan Amerika, terdapat proliferasi signifikan pasar penerima wisatawan baru di wilayah berkembang. Menurut data UNWTO, dua kawasan yang secara tradisional menerima wisatawan tinggi, Eropa dan Amerika, secara bersama-sama menarik 70,7 persen dari total kedatangan wisatawan dunia pada tahun 2011. Namun, pada tahun 2016, persentase ini menurun menjadi 66,9 persen demi kawasan berkembang seperti Asia & Pasifik. Antara tahun 2011 dan 2016, penurunan persentase penerimaan wisatawan dunia di Eropa adalah yang paling signifikan di antara kawasan lainnya yang turun dari 44,8 persen menjadi 36,7 persen demi kawasan berkembang (UNWTO, 2018).

Pariwisata internasional telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama dan sumber penting pendapatan devisa serta lapangan kerja di banyak negara berkembang. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan pariwisata telah mendapat banyak perhatian dalam strategi pembangunan nasional banyak negara berkembang, dan ditempatkan pada agenda banyak konferensi internasional terbaru tentang pembangunan berkelanjutan (SESRIC, 2018).

Konsep pariwisata internasional kemudian menjadi penting bagi tiap negara-negara dalam sistem internasional sebagai sektor untuk diperhatikan.

Interdependensi pariwisata terhadap sektor-sektor lainnya menyebabkan bahwa industri pariwisata tidak dapat dipandang remeh begitu saja. Bahwa banyak variabel-variabelnya yang dapat memengaruhi situasi ekonomi dan politik internasional, menjadikannya isu dan kajian yang substansial penting dibicarakan dalam perhelatan internasional seperti G20. Maka dari itu, momentum Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pariwisatanya pasca pandemi COVID-19 dengan bahasan-bahasan konkrit pariwisata internasional dengan negara-negara anggota G20.

2.2.3 Politics of Tourism

Dalam konteks penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah *Politics of Tourism* atau politik dalam pariwisata. Hubungan antara politik dan pariwisata adalah sebahagian kecil dari ilmu sosial pariwisata, dan bahwa alur politik dapat merubah pola, proses, dan arah perkembangan sektor pariwisata (Butler & Suntikul, 2010). Premis utamanya adalah bahwa pariwisata merupakan fenomena high politics (Richter, 1990). Kemudian, sangatlah penting bahwa pihak yang berwenang dalam Menyusun kebijakan publik dapat memahami fakta bahwa, industri pariwisata merupakan industri yang sangat besar dan kompetitif, serta memiliki konsekuensi sosial yang tajam terhadap seluruh masyarakat (Richter, 1990).

Dalam melihat hubungan antara politik dan pariwisata, terdapat hubungan elemen-elemen politik seperti kebijakan publik yang determinan atau setidaknya memberikan pengaruh terhadap pariwisata (Butler & Suntikul, 2010). Maka dari itu, menjadi penting untuk mempertimbangkan bahwa bagaimana politik dalam pariwisata berpengaruh pada hubungan internasional, administrasi publik, dan penyusunan kebijakan publik. Ketiga aspek tersebut seringkali menjadi sub pembahasan yang terpisah, namun pada kajian politik dalam pariwisata adalah gabungan dari ketiganya (Richter, 1990).

Politik berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh dalam suatu masyarakat serta dalam keputusan-keputusan spesifik mengenai kebijakan publik. Sementara kebijakan publik adalah apa yang diputuskan oleh suatu pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan terkait isu dan masalah yang memerlukan

intervensi pemerintah (Butler & Suntikul, 2010). Hall dan Jenkins (1995) mendeskripsikan kebijakan publik pariwisata sebagai apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mengenai sektor pariwisata.

Peran pariwisata dalam mempengaruhi hubungan internasional tidak kalah penting daripada industri-industri lainnya. Pariwisata dapat dianalisis sebagai variabel independen yang memiliki dampak politik, bahwa terdapat pengaruh arus pariwisata dan integrasi regional. Kemudian, Richter (1990) memberikan hipotesis bahwa alur pariwisata bahkan dapat membantu dalam prediksi ekonomi dan militer (Richter, 1990). Hipotesis ini juga didukung oleh pernyataan dari Robert Stock (1977) yaitu arus pariwisata antara dua negara dapat digunakan sebagai tanda tingkat kepentingan antara kedua negara dan rakyatnya. Peran-peran industri pariwisata tersebut menunjukkan bagaimana keterkaitan politik dalam pariwisata menjadi elemen penting bagi negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

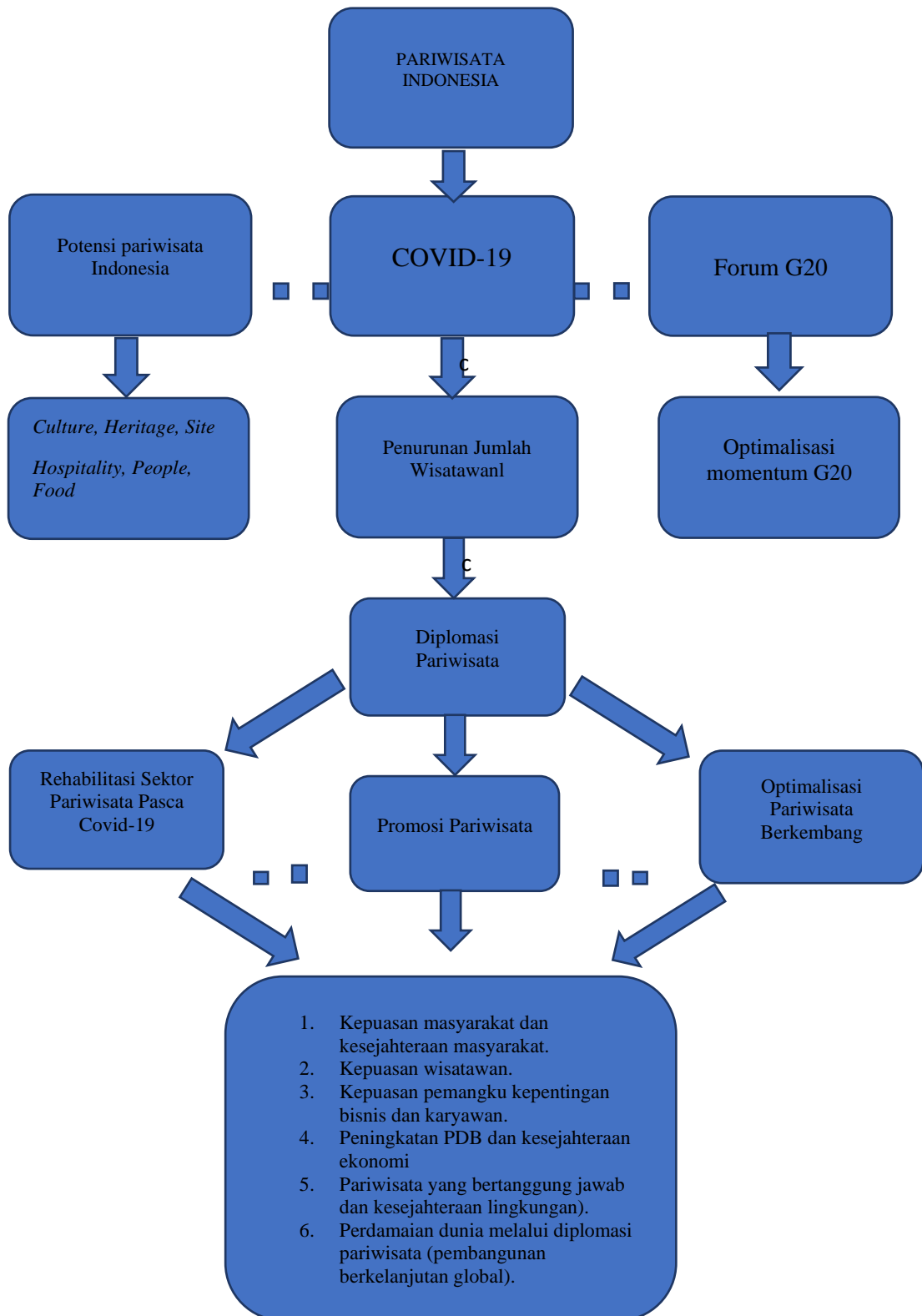
Sebagai contohnya adalah Amerika Serikat, yang menggunakan industri pariwisata sebagai senjata politik. Amerika Serikat menunjukkan resistensinya terhadap rezim Republik Rakyat Cina (RRC) dan Kuba dengan melarang perjalanan wisata ke negara-negara tersebut selama bertahun-tahun. Hal itu dilakukan dengan mengurangi jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke dalam kedua negara tersebut, sehingga dapat melemahkan ekonominya. Amerika Serikat juga menulis ketentuan spesifik mengenai pariwisata dalam perjanjiannya dengan negara-negara seperti Uni Soviet, Mesir, dan Rumania yang memiliki tujuan bahwa perjalanan internasional dapat memberikan insentif untuk memperbaiki hubungan bilateral (Richter, 1990). Persoalan tersebut mendemonstrasikan bagaimana politics of tourism atau politik dan pariwisata, menjadi elemen yang tidak terpisahkan sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kelanjutan keduanya.

Dengan demikian, melalui konsep Politics of Tourism, penulis dapat menganalisis bagaimana Presidensi G20 sebagai perhelatan banyak negara-negara dapat menjadi wadah bagi Indonesia berpolitik untuk meningkatkan ketahanan pariwisatanya pasca pandemi COVID-19. Kerjasama antara negara-negara G20 yang dapat dihubungkan melalui hubungan politik dapat menjadi instrument efektif dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka asumsi penelitian ini berupa **“Dengan adanya Presidensi G20 di Indonesia di harapkan mampu membantu Indonesia dalam promosi pariwisata Indonesia di kancah internasional pasca Covid-19”**. Kondisi pariwisata Indonesia pasca Covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan Indonesia memfokuskan pemulihan ekonomi dalam sektor pariwisatanya.

2.4 Kerangka Analisis



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian